

MODEL E-PLANNING UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ahmad Haidar Mirza

*Teknik Informatika Universitas Bina Darma
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12 Palembang
Email : haidarmirza@mail.binadarma.ac.id, haidarmirza@yahoo.com*

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang berorientasi pada sistem komputerisasi yang sudah merupakan tuntutan disegala bidang maka hampir semua unit/intansi/lembaga pemerintah berupaya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam proses menunjang proses pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasilguna di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) agar pembangunan bisa terlaksana secara merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat, maka perlu dibangun dan dikembangkan suatu Sistem E-Planning yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah kabupaten OKU dalam penentuan prioritas pembangunan di wilayah kabupaten OKU untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktifitas, serta mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi antara pusat dan daerah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengupayakan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien. Model E-Planning yang dirancang dan dibangun diharapkan akan memudahkan proses penyampaian input program perencanaan pembangunan mulai dari kecamatan, rentra SKPD. Perancangan dan pengembangan Model E-Planning ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa data, dengan mengikuti tahapan – tahapan dalam sistem siklus pengembangan sistem waterfall (SDLC).

Kata Kunci : E-Planning, OKU, Model, Sistem

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan yang berbasis TI dan internet (e-government) banyak memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat secara luas. Sehingga semua pihak dapat mencari dan mengetahui informasi serta melakukan transaksi dengan instansi pemerintah daerah kapan dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Kompleksnya urusan dan pelaku yang terlibat, menuntut pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e government Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang sangat tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pembangunan yang merata di wilayah kabupaten OKU. Hal itu disebabkan karena sulitnya pemerintah dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 2008 dan belum ada keterkaitan substansi antar dokumen perencanaan yang satu dengan dokumen perencanaan yang lain, guna merespon paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, misalnya dari top-down planning ke bottom-up planning, dari budaya petunjuk ke budaya partisipasi. Menurut Aziz (2012), proses penyusunan RKPD menunjukkan masih terdapat kompleksitas permasalahan. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah tahap penyusunan mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forumSKPD, sampai musrenbang tingkat kota. Aziz (2012) menganalisa permasalahan perencanaan pembangunan dengan pendekatan soft systems methodology mengelompokkan kompleksitas tersebut dalam tiga tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan mendefinisikan sistem permasalahan dan membangun model konseptual. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem komputerisasi yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dimulai dari perangkat pedesaan sampai kecamatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat sesuai

dengan kondisi masyarakat. Pemerintah juga dapat menentukan prioritas terhadap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Pada penelitian ini akan dibahas penggunaan sistem *E-Planning* diharapkan dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan pembangunan.

1.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sebuah model E-Planning yang dapat membantu pemerintah daerah kabupaten OKU dalam membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat kabupaten OKU”

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembangunan model E-Planning ini adalah :

1. Terbentuknya model E-Planning untuk membantu proses perencanaan pembangunan untuk kabupaten OKU.
2. Meningkatkan mutu data dan informasi daerah yang handal, cepat, tepat waktu dan akurat dalam mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang pembangunan.

1.3. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana metode ini menganalisa data penelitian untuk memecahkan masalah yang ada, dengan mengikuti tahapan – tahapan dalam sistem siklus pengembangan sistem, yaitu :

1. Perencanaan System, pada tahap ini di lakukan rincian biaya pembuatan sistem pengeluaran manual yang ada.
2. Menganalisis sistem, pada tahap ini dilakukan survei dan investigasi ke sistem pengeluaran manual yang ada, sehingga dapat dirumuskan informasi apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan sistem.
3. Merancang secara konseptual, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif rancangan dan menyiapkan spesifikasi rancangan yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan sistem. Sedangkan merancang secara fisik meliputi perancangan formulir dan laporan, prosedur serta pengendalian.
4. Implementasi Sistem, pada tahap ini di lakukan penerapan software yang telah selesai dibangun.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut *System Development Life Cycle (SDLC)* atau yang lebih dikenal dengan nama Model Waterfall. SDLC (*Systems Development Life Cycle*) adalah proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana, analisa, desain, implementasi, uji coba dan pengelolaan (Britton, Carol (2001)). Pendekatan ini dirasa cukup baik dalam hal ini mengingat kebutuhan user yang berubah-ubah sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Sistem dapat sewaktu-waktu berubah seiring perubahan bisnis proses atau adanya kebijakan baru dalam implementasi kedepannya. Tahapan-tahapan pengembangannya adalah :

1. Feasibility atau Requirement
2. Analisis
3. Desain
4. Development
5. Testing
6. Implementasi
7. Maintenance

1.4.2. Perencanaan / Planning

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

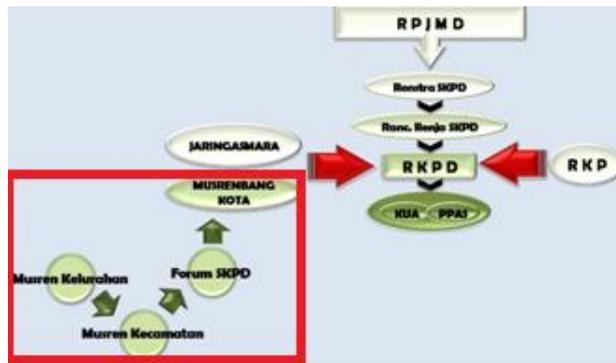
2. Pembahasan

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan Sistem ini menggunakan metodologi System Development Life Cycle berikut ini urutan tahapan prosesnya :

1) Survey System

Untuk menemukan inti permasalahan dan mendefinisikan kebutuhan sistem serta solusi dari permasalahan yang ditemukan tahapan awal ini dilakukan survei sistem. Yaitu dengan mengunjungi objek yang akan menggunakan sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan yaitu melakukan wawancara dengan pengguna sistem, mengumpulkan laporan cetak yang dihasilkan sistem yang lama. Dari survei ini dapat

digambarkan alur perencanaan model sistem E-Planning kabupaten OKU sebagai berikut:



Gambar 1. Alur perencanaan pembangunan daerah

Keterangan : garis merah menggambarkan lingkup E-Planning yang dilakukan

2) Analisa Kebutuhan Sistem

Proses analisa kebutuhan sistem dilakukan dengan bertanya kepada user tentang kebutuhan sistem. Pertanyaan diawali dengan data yang digunakan serta output yang diinginkan. Pihak-pihak yang akan menggunakan sistem serta sejauh mana wewenang yang akan diberikan kepada user. Hal-hal yang terkait dari hasil pendefinisian kebutuhan tersebut dan berkaitan dengan sistem yang akan dibangun sebagai berikut.

1. Sistem ini harus dapat menghimpun data yang berasal dari Musrenbang kecamatan serta mengeluarkan output secara rinci maupun rekap dari usulan yang masuk dari masyarakat.
2. Sistem ini harus dapat menyediakan proses update dari kegiatan usulan musrenbang kecamatan yang kegiatannya perlu dilaksanakan atau tidak.
3. Sistem harus dapat melakukan Pengelompokan terhadap SKPD yang menangani usulan kegiatan.
4. Sistem harus dapat melakukan Penambahan kegiatan SKPD yang tidak berasal dari Musrenbang Kecamatan juga bisa dilakukan pada proses ini.
5. Setelah proses Musrenbang Kabupaten maka sistem harus memberikan output musrenbang secara rekap maupun rinci berdasarkan kecamatan atau SKPD.
6. Sistem harus dapat membantu proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dilakukan dengan menggunakan hasil /output dari sistem yang bersatus Musrenbang Kabupaten. Status RKPD tidak perlu dimasukkan ke sistem.
7. Sistem harus dapat merekap dan mendokumentasikan data KUA dan PPAS yang telah disepakati.

Berikut ini proses secara garis besar yang terjadi pada SIM Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU :

1. Input data SKPD dan Kecamatan
2. Input Permasalahan
3. Input Tindakan
4. Input Kegiatan per Kecamatan
5. Set status Musrenbang Kecamatan menjadi Musrenbang Kabupaten (untuk kegiatan yang disetujui dalam Musrenbang Kabupaten)
6. Set Kegiatan ke SKPDa
7. Penambahan Kegiatan SKPD yang tidak berasal dari Musrenbang Kecamatan
8. Input data RKPD

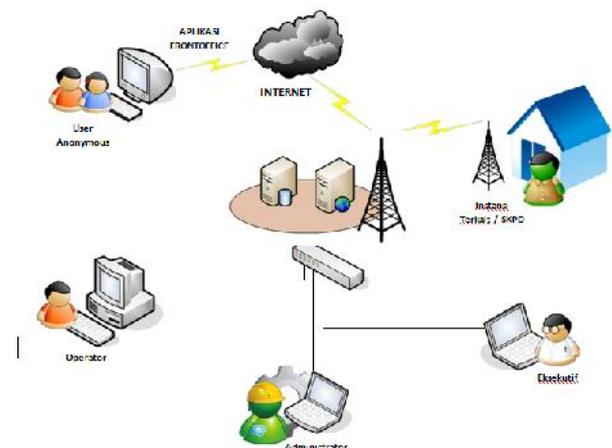
Laporan:

1. Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan per Kecamatan (view & cetak)
2. Rekapitulasi Musrenbang Kabupaten per Kecamatan (view & cetak)
3. Rekapitulasi Musrenbang Kabupaten per SKPD (view & cetak)
4. Rekapitulasi KUA dan PPAS

3) Perancangan / Design Sistem

Merancang alir kerja (workflow) dari sistem dalam bentuk diagram alir atau Data Flow Diagram (DFD), merancang basis data dalam bentuk Entity Relationship Diagram(ERD) bisa juga sekaligus membuat basis data secara fisik. Merancang input output aplikasi(interface) dan menentukan form-form dari setiap modul yang ada. Merancang arsitektur aplikasi dan jika diperlukan menentukan juga kerangka kerja (framework) aplikasi. Pada tahapan ini atau sebelumnya sudah ditentukan teknologi dan tools yang akan digunakan baik selama tahap pengembangan maupun pada saat implementasi.

Arsitektur sistem yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :



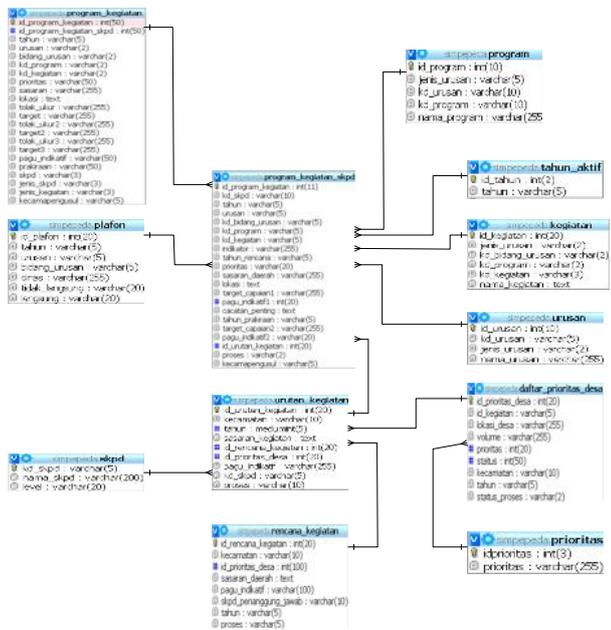
Gambar 2. Arsitektur sistem

Arsitektur sistem untuk model E-Planning dirancang berbasis web yang akan dapat diakses oleh aparat

pemerintah dari tingkat pedesaan melalui kecamatan sampai kepada pihak pelaksana / SKPD terkait dan para pengambil keputusan.

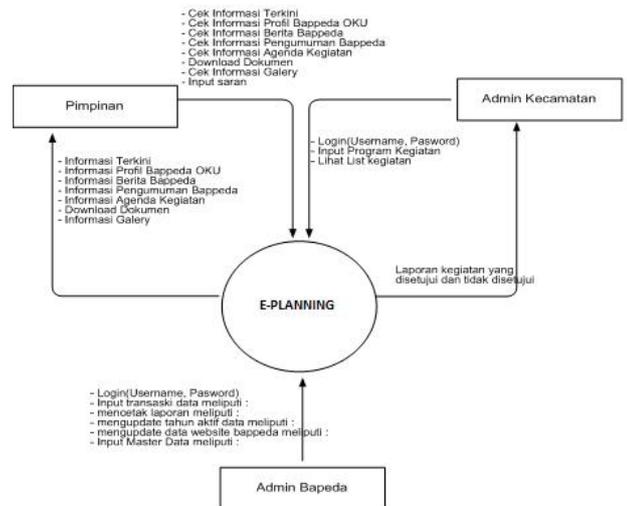
Skema Relasi

Untuk menggambarkan relasi atau hubungan yang terjadi antara masing-masing tabel pada sistem yang dirancang, digunakan diagram skema relasi berikut ini :



Gambar 3. Skema Relasi

Model proses yang diusulkan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Diagram Konteks

Model E-Planning yang dihasilkan merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dan bisa diakses sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Proses dimulai

dengan admin/user dari masing-masing kecamatan melakukan input program kegiatan yang berasal dari masing-masing desa/kelurahan yang berada menjadi wilayah kecamatan tersebut. Program kegiatan yang diusulkan oleh setiap kecamatan akan dibawah ke forum SKPD dan akan menjadi Musrenbang kota/kabupaten untuk mendapat persetujuan dari DPRD.

4) Implementasi

Hasil dari analisis dan perancangan yang dilakukan menghasilkan sebuah model sistem E-Planning yang bisa diimplementasikan di kabupaten OKU.



Gambar 5. Halaman Login

Pada model E-Planning ini terdapat 3 level pengguna :

1. Level Kecamatan / SKPD
 User kecamatan akan memasukan data usulan program kegiatan yang berasal dari pedesaan, kelurahan maupun kecamatan sendiri. Pada model E-Planning ini user desa/kelurahan belum bisa untuk memasukan usulan kegiatan secara langsung dikarenakan infrastruktur TI belum tersedia di tingkat perangkat pedesaan secara merata, walaupun ada beberapa pedesaan yang sudah memiliki fasilitas TI. Usulan kegiatan tersebut akan dibuat skala prioritas dan langsung dirujuk ke SKPD yang sesuai dengan usulan tersebut.
2. Level Bappeda
 Usulan kegiatan diterima sebagai kegiatan yang perlu dilaksanakan maka sistem harus menyediakan fasilitas untuk menandai / update (status) terhadap usulan tersebut untuk dilanjutkan atau tidak. Pengelompokan terhadap SKPD yang menangani usulan kegiatan juga dilakukan pada proses ini.
3. Level Pimpinan

Menerima output berupa usulan musrenbang
 Kota/kabupaten



Gambar 6. Model E-Planning

Pada model *E-planning* ini masyarakat dapat menyalurkan aspirasi melalui perangkat desa yang akan diteruskan oleh pihak kecamatan sebagai usulan input rencana dan kegiatan yang bisa disalurkan sebagai bagian dari musre kecamatan yang terintegrasi dengan forum SKPD. Bapedda sebagai badan yang berperan serta aktif melakukan proses seleksi, menentukan prioritas dan plafon kegiatan sesuai dengan usulan yang diusulkan masyarakat pada musren kecamatan. Usulan tersebut akan terakumulasi dalam musrenbang kota

Pada saat implementasi juga dilakukan proses pengujian model sistem dengan menggunakan metode black-box.

Tabel 1. Pengujian sistem

Nama Bagian	Kelas Uji	Butir Uji	No. Identifikasi	Jenis Pengujian	Teknik Pengujian	Hasil
WEB SIMPEP EDA	Halaman Utama	Lihat Informasi	WI. 001	Sistem	Black Box	Ok
	Profil Bappeda OKU	Lihat Informasi	WI. 002	Sistem	Black Box	Ok
	Berita	Lihat Informasi	WI. 003	Sistem	Black Box	Ok
	Pengumuman	Lihat Informasi	WI. 004	Sistem	Black Box	Ok
	Agenda Kegiatan	Lihat Informasi	WI. 005	Sistem	Black Box	Ok
Halaman Admin Bappeda	Homepage	Lihat Informasi	HA. 001	Sistem	Black Box	Ok
	Agenda	Input Agenda	HA. 002	Sistem	Black Box	Ok

		Kegiatan				
	SKPD	Input SKPD Baru	HA. 003	Sistem	Black Box	Ok
	Urusan	Input Bidang Urusan	HA. 004	Sistem	Black Box	Ok
	Program	Input Program Baru	HA. 005	Sistem	Black Box	Ok
	Kegiatan	Input Kegiatan Baru	HA. 006	Sistem	Black Box	Ok
	Rencana Program dan Kegiatan	Input Rencana Program & Kegiatan	HA. 007	Sistem	Black Box	Ok
	Plafon Anggaran	Input Data Plafon	HA. 008	Sistem	Black Box	Ok
	Laporan	Lihat Informasi	HA. 009	Sistem	Black Box	Ok
	Password	Input Data Password	HA. 010	Sistem	Black Box	Ok

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan,

1. Model *E-Planning* yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk membantu proses perencanaan pembangunan di kabupaten OKU.
2. Model *E-Planning* ini dapat merespon usulan dari masyarakat pedesaan hingga kecamatan sehingga pemerintah dapat menetapkan prioritas pembangunan terhadap daerah yang membutuhkan sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan.

3.2. Saran

Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan mengembangkan model E-Planning yang dibangun sampai pada dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sehingga dapat menghasilkan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Anggaran Sementara)

Daftar Pustaka

- [1] Al-Bahra ., 2005, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- [2] Aziz, Nana Abdul, 2012, *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Menggunakan System Lunak (Soft System)*, <http://www.academia.edu/4005385>
- [3] Britton, Carol., 2001, *Object-Oriented Systems Development*. McGraw-Hill
- [4] Jogiyanto, 2004, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta
- [5] Kroenke, David. 2006, *Database Processing*, Pearson Prentice Hall
- [6] Undang-undang no. 5 tahun 2004

Biodata Penulis

Ahmad Haidar Mirza, memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T), Jurusan Teknik Informatika di Universitas Gunadarma Jakarta, lulus tahun 1997. Memperoleh gelar Magister Komputer (M.Kom) Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2006. Saat ini menjadi Dosen di Magister Teknik Informatika di Universitas Bina Darma Palembang.